

# Peranan Sosio-Kultural Masyarakat dalam Reformasi Madrasah Swasta Menjadi Lembaga Persekolahan

Nurul Ulfatin

**Abstract:** This study aimed to find out a substantive theory on the forming process and change of private *madrasah*. It's emphasized on personnel development and communities' socio-cultural characteristics. The study implemented a qualitative approach at four private *Madrasah Ibtidaiyah* (MIS). The result indicated that the MIS were firstly founded by *kyais* as informal education institutions and later growth become formal education ones, so that enable to develop as school institutions with more professional management. The MIS were handled by teachers and foundation's activists with special characteristics but without qualification as professional teachers, so that the MISs' development was unique and less professional. The socio-cultural characteristics of the MIS were coloured by their socio-cultural environment so that the MIS development should be synchronized to the socio-cultural development.

**Kata kunci:** reformasi sekolah, madrasah ibtidaiyah swasta, karakteristik sosio-kultural masyarakat, lembaga persekolahan.

Dalam perjalanan sejarah, madrasah swasta disebut sebagai perguruan swasta (Tilaar, 1995). Istilah "perguruan" ini sampai tahun 2002/2003 masih digunakan oleh Departemen Agama untuk menyebut salah satu bidang pengelolaan madrasah-madrasah di Kantor Departemen Agama (Kantor Depag Kabupaten Malang, 2003). Keberadaan madrasah swasta di dalam sejarah perkembangan

---

*Nurul Ulfatin adalah dosen Jurusan Administrasi Pendidikan (AP) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.*

sistem pendidikan nasional dapat dikatakan unik. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran, dirumuskan secara khusus tentang sekolah partikelir (swasta). Dalam Bab IX Pasal 13 ayat I disebutkan "atas dasar kebebasan tiap-tiap warga negara penganut suatu agama atau keyakinan hidup, maka kesempatan leluasa diberikan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah partikelir". Pada ayat 2 disebutkan bahwa peraturan khusus tentang sekolah-sekolah partikelir ditetapkan dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 ini dengan jelas dikemukakan betapa kuatnya keberadaan perguruan swasta (termasuk madrasah swasta), sebab peraturan yang khusus mengenai sekolah swasta ditetapkan dengan undang-undang dan bukan sekedar dengan peraturan pemerintah atau keputusan menteri.

Dalam usaha meningkatkan partisipasi perguruan/pendidikan swasta di dalam pembangunan, pada tahun 1971 dibentuklah Majelis Perguruan Swasta (MPS). Pada tahun 1980, MPS tersebut telah berhasil merumuskan ciri-ciri identitas dari perguruan swasta sebagai berikut: (1) setiap perguruan swasta memiliki keunikan dan ciri tersendiri dalam pelaksanaan pendidikannya, sesuai dengan asas-asas pandangan hidup dan cita-citanya; (2) memiliki jiwa perjuangan dan patriotisme, mempertahankan kepribadian dan memperjuangkan aspirasinya; (3) berjiwa perintis/pelopor; dan (4) terbuka, selektif dan berkepribadian. Melihat ciri-ciri tersebut, jelaslah bahwa madrasah swasta memiliki keunikan dan ciri-ciri yang khas. Pada tahun 1980 juga telah dirumuskan delapan prinsip perguruan swasta. Dari delapan prinsip itu, dua diantaranya men-jelaskan secara khusus tentang madrasah, yaitu (1) pendiriannya didasarkan atas motivasi luhur dan misi yang berdasarkan agama, dan (2) berpola religius, kultural, kemasyarakatan dan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sekolah-sekolah swasta atau perguruan swasta (termasuk madrasah swasta) diatur pada bab XIII mengenai peranserta masyarakat. Pada pasal 47 bab tersebut dinyatakan (1) masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (2) ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan. Di dalam penjelasan pasal ini dikatakan bahwa baik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, berkedudukan sama dalam sistem pendidikan nasional. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud untuk menghargai setiap penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki

ciri tertentu, seperti yang berlatar belakang keagamaan, kebudayaan, dan sebagainya.

Selain mempunyai ciri khusus yang terkait dengan sejarah perkembangan sistem pendidikan nasional, madrasah swasta juga memiliki ciri khusus yang terkait dengan sistem penyelenggaraannya. Dalam era kebangkitan sebelum kemerdekaan, madrasah swasta berperan sebagai salah satu alat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, di samping sebagai bentuk layanan pendidikan keagamaan. Seperti yang telah dikemukakan oleh Tilaar (1995), pada era tersebut, perguruan swasta pada dasarnya merupakan alat berjuang bangsa Indonesia untuk mandiri dan terlepas dari berbagai ikatan dengan kebudayaan penjajah. Perguruan swasta bukan berdiri karena motif mencari keuntungan atau hanya untuk menjadi sesuatu yang lain dari pendidikan kolonial, tetapi secara sadar diarahkan untuk pembangunan kebangsaan atau pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Pada masa setelah kemerdekaan sampai sekarang, penyelenggaraan madrasah swasta diorientasikan pada bentuk layanan pendidikan keagamaan. Secara organisatoris, madrasah swasta adalah salah satu jenis sekolah di bawah pengelolaan Departemen Agama. MIS misalnya, menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 368 tahun 1993, adalah sekolah dasar (SD) yang berciri khas Agama Islam. Namun, dalam perjalanan perkembangan pendidikan, madrasah swasta memiliki perbedaan dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Gejala yang terjadi di lapangan, banyak ditemukan madrasah swasta yang sekarang sudah disetarakan dengan sekolah umum. Proses penyeteraaran itu memerlukan waktu yang panjang, dimulai dari bentuk pendidikan informal yang kemudian mengalami perkembangan sampai menjadi bentuk persekolahan. Seiring dengan itu, faktor personel yaitu guru dan pengurus yayasan, dan faktor sosio-kultural masyarakat di sekitarnya sangat mewarnai perilaku madrasah, sehingga keberhasilannya sebagai lembaga persekolahan yang disetarakan dengan sekolah umum sangat tergantung pada karakteristik personel dan karakteristik sosio-kultural masyarakatnya.

Mengkaji karakteristik sosio-kultural masyarakat sebenarnya dapat dikatakan mengkaji bagian dari budaya. Dalam kaitan ini budaya dapat didefinisikan sebagai suatu totalitas sikap, nilai, kepercayaan, tradisi, dan aturan yang dipelajari oleh sekelompok orang untuk diteruskan ke generasi berikutnya sebagai sesuatu yang bermakna dalam kehidupannya (Garcia, 1991). Mengkaji lembaga madrasah swasta memang tidak bisa dilepaskan dari mengkaji unsur-unsur budaya di lingkungan madrasah itu sendiri, karena madrasah

dan lingkungannya merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, budaya di lingkungan madrasah yang mengandung unsur-unsur pokok harus mendapat perhatian. Menurut Soekanto (1982) unsur-unsur pokok itu adalah: (1) peralatan dan perlengkapan masyarakat (pakaian, perumahan, alat-alat, dan sebagainya); (2) mata pencaharian dan sistem ekonomi; (3) sistem kemasyarakatan (kekerabatan, hukum, dan sebagainya); (4) bahasa; (5) kesenian; (6) sistem pengetahuan; dan (7) sistem keagamaan dan kepercayaan. Aspek penting dari pendapat Soekanto dalam kaitan ini adalah sistem kemasyarakatan dan sistem keagamaan dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan atau yang disebut religi, seperti yang diteliti oleh sosiolog Durkheim (Garcia, 1991) adalah faktor yang mendarah daging dan merupakan aspek penting dari sosio-kultural masyarakat.

Faktor-faktor yang terkait dengan sosio-kultural masyarakat ada yang dapat memperlancar kemajuan lembaga pendidikan, tetapi tidak sedikit yang justru menghambat kemajuan pendidikan, terutama lembaga pendidikan yang dikelola langsung oleh masyarakat seperti madrasah swasta. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses perubahan madrasah swasta dari layanan pendidikan informal menjadi lembaga persekolahan dan mengetahui peranan faktor sosio-kultural masyarakat dalam menentukan reformasi sistem pengelolaan pendidikannya.

#### **METODE**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap fokus utama, yaitu (1) bagaimana proses reformasi madrasah swasta menjadi lembaga pendidikan formal (persekolahan)?; (2) bagaimana profil dan pengembangan personel madrasah swasta?; dan (3) bagaimana karakteristik sosio-kultural masyarakat berperan dalam reformasi sistem pendidikan di madrasah swasta?; Di samping itu, penelitian juga dimaksudkan untuk membandingkan deskripsi gambaran pada beberapa situs penelitian untuk menemukan teori substantif yang terkait dengan fokus penelitian.

Fokus penelitian ini banyak menyangkut proses, sehingga diperlukan pengamatan yang mendalam dalam situasi yang alami. Oleh karenanya, penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif atau naturalistik (Marshall & Rossman, 1989; Lindof, 1995; Guba & Lincoln, 1981; Schein dalam Owens, 1991). Dilihat dari fokusnya, dalam penelitian ini ingin dijawab pertanyaan "bagaimana", yang menurut Yin (1984) lebih banyak bersifat eksplanatorik, sehingga lebih tepat jika dipilih rancangan studi kasus multi situs. Pemilihan

rancangan ini dimaksudkan untuk mengembangkan teori yang diangkat dari beberapa latar penelitian yang serupa, sehingga dihasilkan teori dengan transferabilitas yang lebih luas dan lebih umum penerapannya.

Penelitian ini dilakukan di MIS kecamatan Bululawang, kabupaten Malang, Jawa Timur. Dipilihnya kecamatan Bululawang kabupaten Malang sebagai lokasi penelitian didasarkan atas kekhususan yang ada di wilayah tersebut, yaitu (1) termasuk wilayah kabupaten dengan jumlah MIS yang cukup banyak (311 sekolah), (2) di kecamatan Bululawang, orang tua lebih senang menyekolahkan anaknya ke MIS dan tidak ke SD; dan (3) sejumlah MIS memiliki keunikan antara lain sejak berdiri tidak pernah mengalami pergantian kepala sekolah, dan sebagian MIS berada di lingkungan pondok pesantren.

Penelitian ini dilakukan di empat situs yang ditentukan dengan pendekatan induktif, yaitu berdasarkan kriteria yang disusun peneliti dalam proses pemilihan situs. Empat situs tersebut adalah (1) Madrasah Ibtidaiyah Nahdlotul Ulama Bululawang (MINU); (2) Madrasah Ibtidaiyah An-Nur Bululawang (MINUR); (3) Madrasah Nurul Huda desa Bakalan (MIHU); dan (4) Madrasah Ibtidaiyah Taufiqiyah desa Bulupayung (MITA).

Penelitian ini berusaha memahami makna peristiwa dan interaksi orang-orang dalam situs penelitian. Untuk itu diperlukan kehadiran peneliti yang bertindak sebagai instrumen kunci (Guba & Lincoln, 1981). Dalam kaitan ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi berperan serta, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik ini memang merupakan teknik dasar yang selalu digunakan oleh peneliti kualitatif di dalam penelitian-penelitiannya (Bogdan & Biklen, 1982; Marshall & Rossman, 1989; Yin, 1984).

Oleh karena peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, maka uji validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengecek kredibilitas dan auditabilitas datanya. Pengecekan kredibilitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, pengecekan anggota, dan diskusi teman sejawat. Auditabilitas data dilakukan dengan meminta sejumlah auditor untuk mengaudit data secara bertahap untuk setiap kasus.

Ada dua macam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) analisis data dalam situs, dan (2) analisis data lintas situs. Analisis data dalam situs dimaksudkan untuk menganalisis data di setiap MIS yang dijadikan situs penelitian. Sedangkan analisis data lintas situs dimaksudkan sebagai pemaduan temuan-temuan yang dihasilkan dari setiap situs. Penganalisisan datanya dilakukan seperti yang dianjurkan oleh beberapa ahli (Bogdan & Bi-

klen, 1982; Miles & Huberman, 1984; Schlegel, 1984), yaitu dimulai sejak atau bersamaan dengan pengumpulan data dan dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai.

## HASIL

Ada tiga teori substantif yang ditemukan dari hasil penelitian yang dirumuskan dalam bentuk proposisi baik minor maupun major.

### **Teori substantif pembentukan organisasi MIS**

Proposisi Minor:

- P1.1. Pada awal berdiri, MIS merupakan organisasi pendidikan informal yang memiliki sejumlah karakteristik yang menandai keinformalannya. Karakteristik itu antara lain: didirikan oleh *kyai*, melakukan kegiatan di rumah *kyai* atau mushola, diselenggarakan secara musiman, dan hanya mengajarkan pendidikan agama dan budi pekerti.
- P1.2. Proses perubahan MIS menjadi organisasi pendidikan formal setara sekolah dasar mempersyaratkan kondisi yang mendukung. Kondisi itu adalah: lokasi strategis (meskipun di pedesaan), fasilitas cukup, mengajarkan pendidikan umum dan agama, disahkan dengan keputusan menteri, ada banyak murid, struktur organisasi jelas, dan ada keteraturan proses belajar-mengajar.
- P1.3. Walaupun MIS berkembang menjadi organisasi pendidikan formal (persekolahan), namun sebagian ciri-ciri keinformalannya masih tetap dipertahankan. Ciri-ciri itu terdapat pada pola-pola interaksi, cara-cara pengambilan keputusan, dan nilai-nilai budaya pengikat.

Proposisi Major:

MIS pada mulanya didirikan oleh *kyai* dalam bentuk pendidikan informal, kemudian mengalami perkembangan menjadi pendidikan formal, sehingga memungkinkan untuk terus dikembangkan menjadi lembaga persekolahan yang lebih maju dengan pengelolaan yang lebih profesional.

### **Teori substantif pengembangan personel MIS**

Proposisi Minor:

- P2.1. MIS memiliki dua kelompok personel yaitu pengurus yayasan dan guru. Pengurus yayasan memiliki karakteristik khusus yang dapat menghambat kemajuan, yaitu satu keluarga/kerabat *kyai*, selalu pria, berusia tua,

berpikiran tradisional, dan fanatik terhadap ajaran Islam tertentu (Nahdlatul Ulama).

- P2.2. Karakteristik pengurus yayasan sebagaimana P2.1 di atas berdampak pada pengembangan personel MIS yang cenderung *paternalistis*, *androsentris*, dan *kekerabatan*.
- P2.3. Guru-guru MIS rata-rata tidak berkualifikasi sebagai guru profesional, sehingga berdampak pada rendahnya prestasi belajar murid. Ketidakeprofesionalan itu ditandai oleh: lulusan madrasah aliyah (nonkependidikan setingkat SMU), *inbreeding*, tidak memiliki keahlian bidang studi yang diajarkan, sebagai pekerjaan sementara, dan sering diganti oleh guru yang baru.
- P2.4. Walaupun prestasi murid rendah, namun sebagian misi MIS yang berkenaan dengan bidang keagamaan dapat tercapai akibat dari pengembangan personel yang cenderung hanya mengarah bidang keagamaan.

Proposisi Major:

MIS memiliki dua kelompok personel (kelompok guru dan kelompok pengurus yayasan) dengan karakteristik khusus dan cenderung tidak berkualifikasi sebagai tenaga profesional, sehingga pengembangan profesionalitas pendidik memiliki karakteristik yang khas dan kurang profesional.

### **Teori substantif lingkungan sosio-kultural MIS**

Proposisi Minor:

- P3. 1. Karakteristik sosio-kultural masyarakat di sekitar MIS tampak pada tiga segi, yaitu nilai-nilai agama yang dianut, aktivitas sosial, dan penampilan fisik. Karakteristik itu antara lain: penganut Islam-NU, suka melakukan kegiatan kelompok keagamaan, memisahkan kelompok pria dan wanita, berpakaian muslim yang khas, dan cenderung "menolak" kepemimpinan wanita.
- P3.2. Lingkungan sosio-kultural masyarakat tersebut langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada karakteristik sosio-kultural dan manajemen/kepemimpinan MIS. Karakteristik sosio-kultural MIS ditandai oleh adanya: pelajaran ke-NU-an, kegiatan rutin *istighosah* dan doa-doa, memisahkan kelompok murid pria dan wanita, berseragam busana muslim yang khas, dan "menolak" kepala sekolah dan guru olahraga yang berjenis kelamin wanita.

P3.3. Pengaruh lingkungan sosio-kultural masyarakat terhadap MIS terjadi melalui mekanisme dan prosedur kerja yang dilakukan oleh pengurus yayasan dengan karakteristik yang khas.

Proposisi Major:

Lingkungan sosio-kultural MIS diwarnai oleh lingkungan sosio-kultural masyarakatnya, sehingga pengembangan MIS harus dibarengi dengan pengembangan karakteristik sosio-kultural masyarakatnya pula.

## PEMBAHASAN

Terbentuknya MIS menjadi lembaga pendidikan formal umumnya melalui proses panjang. Diawali dengan didirikannya layanan pendidikan secara informal kemudian terus menerus mengalami perkembangan. Semua komponen yang berinteraksi dalam proses perkembangan itu mempengaruhi profil MIS pada saat sekarang. Komponen yang berpengaruh itu adalah (1) dikoordinir, diasuh, dan diajar oleh *kyai* dan keluarganya; (2) bertempat di rumah *kyai* atau musholla; (3) waktu belajar sore hari dan hanya terjadi pada saat menunggu musim panen padi; (4) hanya mengajarkan pelajaran agama dan budi pekerti; dan (5) interaksi proses belajar mengajar lebih didominasi oleh keaktifan guru atau *kyai*. Pada saat sekarang, tampilan MIS sebagai lembaga pendidikan formal (persekolahan) relatif baik yaitu proses belajar mengajarnya berlangsung tertib, tersedia dua macam kurikulum (umum dan agama), dan memiliki struktur organisasi yang relatif permanen.

Proses pembentukan MIS dari pendidikan informal menjadi pendidikan formal, pada dasarnya sesuai dengan pemikiran dinamika kelompok (Taneko, 1989). Bertolak dari teori psikologi sosial, suatu kelompok secara perlahan dapat beranjak menjadi suatu organisasi informal, dan selanjutnya dapat menjadi organisasi formal bila mekanisme yang terjadi di dalamnya cukup menunjang. Berangkat dari *primary group* dapat dicontohkan seperti keluarga yang peka terhadap pendidikan dapat membentuk organisasi pendidikan informal, dan kemudian berkembang menjadi pendidikan formal. Jika dilihat dari muasalannya sebagai kelompok, meskipun tidak tertulis, di dalamnya terdapat norma-norma dalam bentuk *rule of the game* yang disepakati untuk ditaati oleh anggota keluarga. Norma-norma itu terbentuk melalui aliran interaksi satu sama lain yaitu anggota (dalam hal ini keluarga *kyai* dan para santrinya). Individu-individu yang ada di dalamnya saling pengaruh-mempengaruhi, isi-mengisi, dan lama-kelamaan kondisi ini akhirnya melahirkan pola-pola aturan dari in-



teraksi, di mana hasil bentukan yang mendapat kesempatan akan diteruskan dan dikembangkan.

Secara umum, keberadaan MIS sekarang memiliki karakteristik yang khas yaitu ditandai adanya: (1) aturan-aturan yang mengikat tiap anggota; (2) struktur dan kepemimpinan jelas; (3) tujuan dimasukkan dalam bentuk aktivitas-aktivitas dan rencana kerja organisasi; dan (4) ikatan-ikatan antar anggota dikaitkan dengan pencapaian tujuan organisasi. Sifat-sifat keinformalan dalam kehidupan MIS masih sangat terlihat dengan jelas, terutama pola-pola interaksi yang digunakan oleh para anggota, cara-cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin, dan nonna-norma yang diberlakukan di dalamnya.

MIS dalam kondisi sekarang termasuk lembaga pendidikan formal. Sebagai lembaga formal (persekolahan), MIS memiliki tenaga kependidikan. Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah, di MIS terdapat tenaga pendidikan yang disebut guru dan pengelola satuan pendidikan yang disebut kepala madrasah. Kepala madrasah tidak lain adalah guru yang diberi tugas untuk menjadi kepala sekolah. Oleh karenanya, memahami karakteristik kepala sekolah berarti pula harus memahami karakteristik guru. Karakteristik dan kualitas guru yang ada di MIS dapat dikatakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilannya dalam mengelola kegiatan belajar mengajar, dan pada akhirnya sangat berpengaruh terhadap hasil belajar murid. Karakteristik dan kualitas guru di empat MIS yang menjadi situs penelitian banyak memiliki kesamaan. Kesamaan yang menonjol adalah karakteristik guru yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan agama. Pengalaman keagamaan itu berbentuk pendidikan formal (madrasah) dan pendidikan nonformal (pondok pesantren). Sebaliknya, sangat sedikit guru yang memiliki latar belakang pendidikan umum.

Sebagian besar guru di MIS adalah tamatan madrasah aliyah. Dengan kondisi guru semacam ini berarti tidak memiliki bekal pengetahuan kependidikan dan keguruan, sehingga sangat sulit untuk menginginkan prestasi belajar murid yang tinggi. Hal ini terbukti prestasi murid MIS umumnya tergolong rendah. Rendahnya kualitas guru MIS ini ternyata juga terjadi di banyak MIS seluruh Indonesia. Setidaknya hal ini memperkuat penelitian Ruminiati dkk. (1993) yang menemukan bahwa sebagian besar guru MIS hanya lulusan madrasah aliyah dan bahkan ada yang tsanawiyah (setingkat SLTA dan SLTP). Kondisi guru semacam ini dibenarkan oleh Malik Fajar (1998), yang menurutnya berlangsung lama di sebagian besar MIS di Indonesia. Ren-

dahnya kualitas guru MIS ini sebenarnya telah disadari sejak dikeluarkannya surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri (Menag, Mendikbud, Mendagri) tahun 1975, namun sampai sekarang kondisi tersebut belum banyak mengalami perubahan dan kemajuan. Menurut Malik Fajar, rendahnya kualitas guru MIS ini sulit diatasi jika pemerintah bertahan untuk membiarkan MIS berstatus swasta atau swadaya. Pendapat Malik Fajar ini sangat beralasan karena sebagian besar MIS yang berstatus swasta berada di wilayah pedesaan yang masyarakatnya tergolong miskin.

Di samping mempengaruhi prestasi belajar murid, rendahnya kualitas guru juga menyulitkan pengelola (kepala sekolah dan pengurus yayasan) untuk melibatkan mereka dalam kegiatan manajemen yang terstruktur. Dari empat MIS yang menjadi situs penelitian, dua di antaranya tidak ada keterlibatan guru dalam kegiatan manajemen yang terstruktur. Hal ini karena kepala sekolah dan pengurus yayasan kesulitan untuk mendelegasikan kegiatan manajemen kepada guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian yang memadai. Akhimya, kegiatan manajemen hanya dilakukan dengan cara gotong royong yang melibatkan guru secara sukarela. Banyaknya kegiatan manajemen yang dilakukan secara sukarela ini tidak dapat menjamin kualitas keberhasilannya, di samping tidak dapat sebagai sarana belajar yang baik bagi guru yang ingin mengembangkan karir yang menyangkut teknis proses belajar mengajar. Pengurus yayasan MIS memiliki keunikan yang sangat menonjol yang berbeda dengan yayasan-yayasan di sekolah umum, yaitu: (1) beranggotakan sejumlah *kyai*, (2) selalu berjenis kelamin pria, (3) dalam satu yayasan dimiliki/dikelola oleh satu keluarga atau satu kerabat, dan (4) didominasi oleh generasi tua. Berangkat dari keunikan pengurus yayasan ini, MIS masih bertahan dengan unsur-unsur ketradisional sehingga kurang bisa berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan jaman.

Kondisi pengurus yayasan MIS seperti tersebut di atas sangat berbeda dengan pengurus yayasan pada sekolah-sekolah modern. Pada sekolah modern, perhatian penuh dan pola pikir yang dimiliki oleh pengurus yayasan setidaknya telah diterapkan oleh banyak sekolah swasta baik di Indonesia maupun di luar negeri. Di Indonesia, akhir-akhir ini bermunculan sekolah-sekolah unggul, misalnya *Madania Boarding School* di Jakarta, SD Al-Hikmah dan Sekolah Ciputra di Surabaya, dan sebagainya. Walaupun sekolah-sekolah itu berstatus swasta dan dikelola yayasan, namun mampu menjadi sekolah unggulan bertaraf internasional. Aspek kunci yang menjadikan sekolah itu unggul adalah faktor pengelolanya. Untuk sekolah swasta, pengelola ini dibedakan menjadi dua, yaitu pengurus yayasan yang berfungsi semacam

dewan legislatif, dan personel sekolah (kepala sekolah dan guru) yang berfungsi semacam dewan eksekutif sekolah. Telah dibuktikan oleh beberapa peneliti bahwa modal keberhasilan sekolah menjadi unggul adalah kerja keras dan kemajuan pemikiran pengelola sekolah yang dimulai dari pengelola legislatif (pengurus yayasan atau dewan sekolah) (Arifin, 1998; Fajar, 1998).

Sebagai perbandingan, di Australia misalnya, sekitar tahun 1980-an juga bermunculan sekolah-sekolah Katolik yang unggul (Hogan, 1984). Menurut Hogan, penyebab sekolah swasta Katolik di Australia pada umumnya lebih maju dan unggul dari sekolah-sekolah swasta lainnya karena para pemimpin Katolik memiliki perhatian penuh terhadap kemajuan sekolah dan mereka memiliki pemikiran yang maju tentang persekolahan. Oleh sebab itu, sekolah-sekolah Katolik banyak dijadikan model sekolah unggul, dan segala kebijakan dari pemerintah yang menyangkut sekolah swasta harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemimpin-pemimpin Katolik tersebut.

Kemajuan pikiran seperti tersebut di atas itulah yang tidak banyak dimiliki oleh pengurus yayasan MIS di Indonesia. Hal ini tidak hanya untuk MIS yang menjadi situs penelitian saja, tetapi hampir dialami oleh semua MIS di Indonesia yang jumlahnya 25 ribu lebih (Fajar, 1998; Gaffar, 2000). Menurut Gaffar, MIS di Indonesia mengalami kemiskinan pengelolaan pendidikan. Predikat kemiskinan pengelolaan ini akan terus disandang oleh MIS, jika para pengurus yayasannya tidak memiliki pemikiran yang maju dan wawasan yang luas tentang pendidikan, serta kerja keras mereka untuk memajukan pendidikan yang dikelolanya.

Aspek penting lain yang juga perlu dibahas dan mendapat perhatian dari hasil penelitian ini adalah faktor sosio-kultural masyarakatnya. Satu ciri yang sangat menonjol dari masyarakat di wilayah MIS yang menjadi situs penelitian dan sekitarnya, adalah hampir 100% mereka adalah pemeluk agama Islam yang fanatik. Fanatisme agama tersebut mengarah pada suatu keyakinan yang dianut oleh organisasi keagamaan bernama *Nahdlatul Ulama* (NU). Masyarakat yang fanatik pada ajaran NU ini menamakan dirinya sebagai warga *ahlussunnah waljamaah*. Artinya, mereka tergolong kaum (masyarakat) yang menganut *i'tiqad dan amaliah* Nabi Muhammad SAW. dan sahabat-sahabatnya. Ada empat dasar hukum Islam yang dipedomani oleh kaum *ahlussunnah waljamaah* ini, yaitu *Al Qur'an*, *Hadits*, *Ijma'* dan *Qiyas*. Pemberlakuan keempat dasar hukum Islam itu dalam kehidupan masyarakat dilakukan secara ber-tingkat dengan dimulai dari dasar yang paling tinggi yaitu *Al Qur'an* dan berturut-turut ke tingkat yang lebih rendah.

Fanatisme masyarakat terhadap ajaran yang dianut oleh organisasi NU sebagaimana dikemukakan di atas sangat terlihat dengan jelas dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keyakinan, ucapan maupun perilaku dalam keluarga dan masyarakat. Temuan yang demikian ini semakin mengokohkan teori yang dihasilkan oleh Durkheim (dalam Garcia, 1991) bahwa agama merupakan landasan hidup bagi masyarakat dan merupakan budaya yang terus dikembangkan. Oleh karena itu, temuan ini sangat menarik dan penting untuk dibahas lebih lanjut. Pembahasan tentang ini pada hakikatnya bukan memahami esensi metafisik agama tetapi hanya mempelajari aspek sosialnya yang didasarkan pada data empirik yang dapat diverifikasi dengan panca indera.

Jika agama dipelajari dari aspek sosialnya, maka seperti kata Djamarie (1988) bahwa lebih tepat agama diartikan dengan definisi fungsional, yaitu sebagai suatu kesatuan sistem kepercayaan dan pengalaman terhadap sesuatu yang menyatu dalam suatu komunitas moral. Dilihat dari pendekatan fungsional ini, agama dapat dipandang sebagai suatu proses, sebagaimana yang teramati dalam kehidupan sehari-hari (Soelaeman, 1988). Menurut pendekatan ini pula, agama lebih dipandang sebagai karakteristik masyarakat, karena agamalah yang memenuhi berbagai kebutuhan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai struktur sosial. Oleh karena itu, bertolak dari teori di atas, dapat dikatakan bahwa agama merupakan sumber kebudayaan yang sangat tinggi.

Salah satu ciri masyarakat NU adalah suka melakukan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan seperti *tahlilan*, *istighosahan*, dan *dibaan*. Kegiatan-kegiatan semacam ini juga tidak bisa dipungkiri keberadaannya pada masyarakat di sekitar empat situs penelitian. Temuan penelitian ini membenarkan anggapan yang selama ini beredar di masyarakat yang menurut Azizy (2000) orang mengenal NU lantaran *tahlilan*, *istighosahan*, *dibaan*, dan *slametan*. Bahkan dikatakan oleh Azizy bahwa NU lebih identik dengan *pengajian* dan *tahlilan*. Pada masyarakat NU, kegiatan-kegiatan itu telah dilakukan sejak dahulu, dan hingga sekarang terus dilestarikan, sehingga dapat dikatakan sebagai tradisi yang teras turun menurun. Dilihat secara historis, seperti dikatakan oleh Azizy bahwa sejak NU didirikan pada tahun 1926 sebenarnya sengaja dirancang sebagai organisasi sosial keagamaan yang bukan sekedar melakukan *pengajian* dan *tahlilan*, tetapi lebih dari itu sudah direncanakan adanya beberapa program untuk menangani masalah-masalah agama dan social, seperti kebodohan dan pendidikan, kemiskinan, yatim piatu, dan lain sebagainya. Untuk itu, struktur organisasi NU terdiri atas dua lembaga, yaitu disebut *syuriyah* (menangani masalah keagamaan), dan *tanfidziyah* (sebagai pelaksana

program yang terkait dengan hal-hal selain keagamaan). Dalam perjalanannya sampai sekarang, ternyata kemajuan-kemajuan yang dicapai kedua lembaga tersebut belum seimbang, sehingga masyarakat NU diidentikkan dengan masyarakat yang suka melakukan kegiatan kemasyarakatan sejenis *tahlilan*, *istighosahan* dan *pengajian*.

Setiap kegiatan yang melibatkan kelompok masyarakat hampir selalu dilakukan secara terpisah antara kelompok pria dan kelompok wanita. Temuan semacam ini terlihat pada masyarakat di sekitar empat situs penelitian. Pemisahan pria dan wanita ini bermula dari banyaknya kegiatan sosial dan keagamaan yang sering dilakukan dan dikoordinir tokoh masyarakat yang disebut *kyai*. Pemisahan pria dan wanita itu sengaja dilakukan karena menurut keyakinan *kyai* bahwa mengelompokkan pria dan wanita menjadi satu merupakan kegiatan dosa. Karena banyak dan seringnya kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan dan dikoordinir oleh *kyai* tersebut itulah akhirnya pemisahan pria dan wanita dalam setiap kegiatan kemasyarakatan menjadi tradisi bagi masyarakat.

Berbeda dengan alasan yang dikemukakan oleh *kyai* di sekitar MIS tersebut, menurut Richardson (1988), pemisahan pria dan wanita dalam kegiatan kemasyarakatan menunjukkan adanya suatu "*traits*". *Traits* itu mengarah pada pembahasan yang menyangkut stereotipe jenis kelamin. Hal yang penting dari pembahasan stereotipe jenis kelamin ini adalah apakah pemisahan itu berpengaruh baik terhadap orang yang melihatnya maupun terhadap pribadi yang terlibat dalam pemisahan itu atau tidak. Jika berpengaruh, maka analisis lebih lanjut sangat diperlukan, yaitu analisis yang tidak hanya dari segi religius dan sosiologis, tetapi juga dari segi psikologis. Dari segi sosiologis, mungkin saja pemisahan itu berdampak kurang menguntungkan bagi wanita karena pada umumnya pemisahan hanya dijadikan alat untuk menekan kebebasan wanita dalam bertindak. Tetapi, dari segi psikologis, pemisahan pria dan wanita justru merupakan "klinik" yang efektif untuk mengembangkan kepribadian masing-masing komunitas.

Karakteristik sosio-kultural masyarakat sebagaimana telah dibahas di atas, menunjukkan bahwa MIS memiliki karakteristik sosio-kultural yang khusus yang lekat dengan karakteristik masyarakatnya. Hal ini pula menunjukkan bahwa keberadaan MIS memiliki akar budaya yang cukup kuat. Dalam kaitan ini, Fadjar (1998) menyebutkan bahwa MIS sebagai salah satu proyek *uswah hasanah* umat Islam. Maksudnya bahwa MIS sebagai contoh tauladan yang lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat secara swadaya. Oleh karena MIS merupakan teladan yang baik bagi masyarakat, maka keberagaman dan kemandirian masyarakat ikut berperan di dalamnya.

Keberadaan MIS yang mencerminkan sosio-kultural masyarakat menunjukkan pula bahwa manajemen MIS adalah manajemen humanistik. Oleh Suyata (2000) manajemen semacam ini disebut dengan *community based management*, yaitu manajemen yang mengarah pada suatu pola adanya kemandirian sekolah. Ini berbeda dengan sekolah-sekolah negeri yang keberadaan dan kehidupannya sangat tergantung pada pemerintah. Oleh karena itu, jika ingin memperbaiki manajemen MIS, maka sangat tepat bila analisisnya dilakukan dengan pendekatan sosio-kultural, dan bukan pendekatan birokratik-teknis. Pendekatan sosio-kultural ini tidak lain memperhatikan dinamika sosial dan budaya yang ada di sekolah dan sekitarnya guna memahami permasalahan pendidikan dan upaya pemecahannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian, paparan, analisis data, dan pembahasan, maka hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut. Pertama, reformasi profil MIS ditandai oleh beberapa ciri, yaitu (1) bermula dari pendidikan informal kemudian mengalami perkembangan menjadi pendidikan formal; (2) didirikan dan dikelola oleh yayasan yang beranggotakan tokoh masyarakat yang disebut *kyai*; (3) berlokasi di pedesaan, namun tempatnya strategis dengan fasilitas yang cukup untuk mengajarkan pendidikan umum dan agama; tetapi (4) sebagian ciri-ciri keinformalan yang menyangkut pola interaksi, cara pengambilan keputusan, dan nilai-nilai budaya pengikat masih dipertahankan sampai sekarang. Dengan ciri-ciri tersebut, MIS memiliki prospek yang baik dan memungkinkan untuk terus dikembangkan menjadi lembaga pendidikan formal yang lebih profesional sebagai alternatif pilihan pada pendidikan dasar.

Kedua, personel MIS terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok pengurus yayasan, dan kelompok guru. Sebagai pengajar, guru di MIS rata-rata tidak berkualifikasi sebagai guru profesional, yang ditandai oleh lulusan nonkependidikan, *inbreeding*, hanya memiliki keahlian bidang keagamaan, dan menjadi guru sebagai pekerjaan sementara. Sebagai dampaknya terlihat pada rendahnya prestasi belajar murid dan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan manajemen secara terstruktur, meskipun sebagian misi MIS masih tercapai. Di pihak lain, pengurus yayasan sebagai pengelola MIS yang mewakili masyarakat memiliki karakteristik yang kental dengan fanatisme keagamaan dan sifat-sifat yang tradisional, yaitu terdiri atas anggota-anggota dari satu keluarga/ kerabat *kyai*, berjenis kelamin pria, dan berusia tua, sehingga ber-

pengaruh pada pengembangan personel MIS yang cenderung *paternalistik*, *androsentrik*, *kekerabatan*, dan hanya menekankan bidang keagamaan.

Ketiga, MIS berada di tengah-tengah masyarakat dengan karakteristik sosiokultural yang khas. Lingkungan sosio-kultural masyarakat yang mewarnai lingkungan sosio-kultural MIS ditandai oleh tiga segi, yaitu nilai-nilai agama yang dianut, aktivitas sosial, dan penampilan fisik. Nilai-nilai agama yang dianut masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan MIS adalah kecenderungannya ke arah "fanatisme" terhadap keyakinan agama Islam sesuai dengan pandangan NU. Sementara, aktivitas sosialnya ditandai dengan kesukaan melakukan kegiatan keagamaan, dan penampilan fisik terlihat pada pakaian yang selalu berbusana muslim yang khas serta pemisahan kelompok pria dan wanita.

### **Saran**

Beberapa saran dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini. Pengurus yayasan, perlu mengembangkan sistem pengelolaan kelembagaan MIS secara terus menerus ke arah lembaga persekolahan yang profesional. Pengembangan sistem pengelolaan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas semua komponen yang terkait dengan MIS dan menerapkan sistem manajemen yang berorientasi pada profesionalisme kelembagaan. Di samping itu, perlu dilakukan introspeksi dan reorientasi dalam mengembangkan karakteristik MIS, sehingga fanatisme masyarakat yang sering menghambat upaya pencapaian pengembangan kelembagaan pendidikan yang profesional dapat berkurang. Pengembangan MIS diorientasikan pada tujuan kelembagaan pendidikan dan bukan tujuan politik kekeluargaan serta bukan tujuan keagamaan semata.

Kepala MIS disarankan dapat menjadi medium dan fasilitator yang baik dalam menterjemahkan visi dan misi yayasan ke dalam kebijaksanaan operasional MIS tanpa mengurangi bobot keprofesionalan dan keakademikan MIS itu sendiri. Dengan demikian, tujuan pendidikan, visi dan misi yayasan yang menyangkut pembentukan kemampuan umum, keterampilan, kepribadian (budi pekerti), dan keagamaan dapat tercapai secara utuh dan efektif. Kepala MIS hendaknya mendorong para guru (terutama yang pendidikannya rendah) untuk dapat melaksanakan tugas pengajaran dan tugas-tugas yang lain dengan didasari sikap mau mengembangkan diri secara terus menerus dan secara ber-kelanjutan baik yang terkait dengan karakteristik sosio-kultural-keagamaan maupun yang terkait dengan kompetensi profesionalisme pendidikan pada umumnya.

Departemen Agama dalam kaitan ini perlu melakukan intervensi positif untuk kemajuan MIS. Intervensi ini dapat dilakukan dengan memberikan dukungan dana yang memadai untuk meningkatkan kualitas keprofesionalan guru MIS, dan sebagai mediator dan koordinator terhadap MIS dalam men-capai standarisasi lembaga pendidikan. Di samping itu, koordinasi secara intensif antara Departemen Agama dengan lembaga lain seperti Depdiknas, Pemda, dan Lembaga Ma'arif (lembaga pendidikan dari organisasi NU) sangat dianjurkan guna merumuskan standarisasi MIS sebagai lembaga pendidikan formal. Standarisasi itu menyangkut tujuan pengembangan karir guru, dan promosi pendidikan, pengelolaan operasional, jabatan kepala dan penilik sekolah.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, I. 1998. *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengelola Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Berprestasi*. Disertasi tidak diterbitkan. Malang: PPS IKIP MALANG.
- Azizy, A.Q. 2000. *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*. Yogyakarta: LKIS.
- Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. London: Allyn and Bacon, Inc.
- Fadjar, M. 1998. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan.
- Gaffar, M.F. 2000. *Pembiayaan Pendidikan: Permasalahan dalam Kebijakan dalam Perspektif/Reformasi Pendidikan*. Makalah disampaikan pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia di Jakarta 19-22 September.
- Garcia, R.L. 1991. *Teaching in a Pluralistic Society: Concepts, Models, Strategies. Second Edition*. New York: Harper Collin, Publishers.
- Guba, E.G. & Lincoln, Y.S. 1981. *Effective Evaluation: Improving the Usefulness of Evaluation Results Through Responsive and Naturalistic Approaches*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Hogan, M. 1984. *Public vs Private Schools*. Victoria: Penguin Book Ltd.
- Keputusan Menteri Agama RI. No. 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.*
- Lindlof, T.R. 1995. *Qualitative Communication Research Methods*. London: Sage Publications.
- Marshall, C. & Rossman, G.B. 1989. *Designing Qualitative Research*. Newbury Park, California: Sage Publication.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. London: Sage Publications.
- Owens, R.G., 1991. *Organizational Behavior in Education*. Fourth Edition. Boston: Allyn and Bacon.
- Richardson, L. 1988. *The Dynamics of Sex and Gender; A Sociological Perspective*. Third Edition. New York: Harper & Row, Publishers, Inc.



- Rum'miati, Ulfatin, N., Syafrawi & Djazimah. 1996. *Kesiapan Guru, Sarana dan prasarana Madrasah Ibtidaiyah dalam Pelaksanaan Wajib Belajar*. Laporan Penelitian tidak dipublikasikan. Malang: Lembaga Penelitian IKIP Malang.
- Schlegel, S.A. 1984. *Penelitian Grounded dalam Ilmu-Ilmu Sosial*. Surakarta: Fak. Sospol UNS.
- Soekanto, S. 1982. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soelaeman, M.I.1988. *Suatu Telaah tentang Manusia-Religi-Pendidikan*. Jakarta: P2LPTK Ditjen Dikti Depdikbud.
- Suyata. 2000. *Desentralisasi Pendidikan dan Kemandirian Sekolah: Suatu Tinjauan Sosio-kultural*. *Dinamika Pendidikan*. Th. VII, No.2 Agustus 2000.
- Taneko, S.B. 1984. *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali.
- Tilaar, H.A.R. 1995. *Limapuluh Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Armas Duta Jaya.
- Yin, R.K. 1984. *Case Study Research: Design and Methods*. London: Sage Publications.